

ABSTRAK

Pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak seksi 1 mencakup Desa Purwosari, Kabupaten Demak. Kebijakan dan perlindungan hukum atas ganti kerugian oleh pemerintah menjadi permasalahan karena beberapa bidang yang terindikasi musnah akibat banjir rob. Masyarakat mengharapkan ganti kerugian yang adil dan layak. Saat ini proses pengadaan tanah pada wilayah Desa Purwosari belum terealisasi dan sedang dikaji kembali oleh Pemerintah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak terhadap ganti kerugian pada kegiatan pengadaan tanah musnah dalam pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak serta mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pemilik hak yang tanahnya musnah akibat bencana banjir rob.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidangan yang tergenang sebanyak 113 bidang yang akan diberi dana kerohiman. Masyarakat menolak karena tanah berpotensi timbul setelah pembangunan. Pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tetap memikirkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan teori progresif. Pada prinsipnya negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah musnah, namun pemerintah telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah musnah dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022.

Apabila muncul tanah timbul saat proses kontruksi, hendaknya pemerintah memberikan hak prioritas bagi pemilik hak untuk mengklaim sisa tanahnya. Sehingga dengan kebijakan tersebut, masyarakat juga hendaknya sepakat menerima dana kerohiman. Pemerintah perlu melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2022 terkait perhitungan nilai minimum dana kerohiman.

Kata Kunci: *Kebijakan Ganti Rugi, Pengadaan Tanah, Tanah Musnah*

ABSTRACT

Land acquisition in the construction of the Semarang-Demak toll road section 1 covers Purwosari Village, Demak Regency. The policy and legal protection of compensation by the government is a problem because some fields are indicated to be destroyed by tidal floods. The community expects fair and decent compensation. Currently, the land acquisition process in the Purwosari Village area has not been realized and is being reviewed by the Government.

The purpose of this research is to find out and analyze the policy of the Demak Regency Land Office on compensation for losses in land acquisition activities destroyed in the implementation of the construction of the Semarang-Demak Toll Road and to find out and analyze the legal protection provided by the government to rights holders whose land was destroyed by the tidal flood disaster.

The research method used is empirical juridical method. Data collection techniques using field studies by conducting interviews and literature studies. This research was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The results showed that the inundated fields were 113 fields that would be given kerohiman funds. The community refuses because the land has the potential to arise after development. The government can provide policies that still think about the welfare of the community based on progressive theory. In principle, the state cannot provide legal protection against land loss, but the government has accommodated legal protection for owners of rights to land loss with the establishment of Presidential Regulation Number 52 of 2022.

If land arises during the construction process, the government should provide priority rights for the right owner to claim the remaining land. So that with this policy, the community should also agree to receive a kerohiman fund. The government needs to conduct a Judicial Review to the Supreme Court of Article 13 paragraph (2) and paragraph (3) of Presidential Regulation No. 52 of 2022 related to the calculation of the minimum value of compensation funds.

Keywords: *Policy for compensation, Land Acquisition, Land Destroyed*